BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Studi Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi reformasi birokrasi di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum sepenuhnya berhasil. Upaya perubahan telah dilakukan pada komponen pengungkit, namun belum menghasilkan dampak signifikan pada komponen hasil. Dalam implementasinya, berbagai langkah strategis telah diterapkan, seperti perbaikan sistem pelayanan, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, proses ini masih menghadapi kendala yang menghambat pencapaian target WBK, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya komitmen pegawai, serta belum terpenuhinya data dukung dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Oleh karena itu, diperlukan langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya terlaksana dalam aspek perubahan kebijakan, tetapi juga berdampak nyata dalam peningkatan kualitas layanan dan pencegahan korupsi.

2. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kurangnya komitmen pegawai dalam menjalankan reformasi birokrasi, pemahaman yang masih rendah mengenai konsep dan tujuan Zona Integritas, serta kendala dalam pemenuhan data dukung dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kanwil BPN Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain peningkatan pemahaman pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi, penguatan mekanisme reward and punishment guna mendorong disiplin pegawai, serta optimalisasi peran pimpinan dalam memberikan motivasi kepada seluruh jajaran. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui inovasi layanan berbasis teknologi serta penguatan pengawasan internal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses layanan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pencapaian WBK masih memerlukan peningkatan yang lebih sistematis, terutama dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta memastikan seluruh pegawai memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap reformasi birokrasi.

B. Saran

1. Kanwil BPN Provinsi Jambi disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan internal bagi seluruh pegawai. Sosialisasi ini bertujuan agar setiap pegawai memahami konsep, manfaat, serta implementasi Zona Integritas secara lebih mendalam. Dengan adanya pemahaman yang baik,

diharapkan setiap individu dalam organisasi dapat memiliki komitmen yang lebih kuat dalam mendukung reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

2. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik, khususnya di Kanwil BPN Provinsi Jambi. Salah satu hambatan utama dalam implementasi Zona Integritas adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pelayanan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan teknologi dalam sistem layanan, seperti digitalisasi dokumen pertanahan, penerapan sistem antrian online, serta penyediaan layanan berbasis daring, perlu diprioritaskan.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi Zona Integritas di Kanwil BPN Provinsi Jambi. Pengawasan yang lebih intensif diperlukan agar setiap satuan kerja dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur dalam pembangunan Zona Integritas telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pendampingan yang lebih aktif dalam pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) akan sangat membantu dalam mengatasi kendala administratif yang sering menjadi hambatan dalam memperoleh predikat WBK.